

# Negosiasi Dialektis Identitas Politik Islam dalam Masyarakat Platform: Adaptasi dan Akomodasi Logika Media Sosial pada Partai Keadilan Sejahtera

Nurdin Qusyaeri<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

\*Corresponding author: qusyaeri77@gmail.com

**Abstrak:** Platform digital telah mengonfigurasi ulang secara struktural cara partai politik Islam memproduksi dan mengontestasikan legitimasi politik dalam demokrasi elektoral. Artikel ini mengkaji bagaimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menavigasi ketegangan antara mempertahankan identitas politik Islam yang ideologis dan beradaptasi dengan logika media sosial dalam masyarakat platform Indonesia. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bidang Komunikasi dan Informasi Digital (Komdigi) DPP PKS, observasi digital sistematis terhadap akun resmi partai, dan analisis dokumen partai, studi ini mengembangkan model Negosiasi Dialektis. Temuan menunjukkan bahwa PKS mempertahankan nilai normatif Islam sebagai fondasi ideologis sambil mentransformasikan bentuk representasinya agar selaras dengan afordansi platform. Adaptasi berlangsung melalui budaya visual, literasi algoritmik, dan komunikasi partisipatif; akomodasi berlangsung melalui objektifikasi nilai Islam menjadi barang publik universal—kesejahteraan, keadilan, pelayanan, dan antikorupsi. Artikel ini berargumen bahwa mediatisasi tidak otomatis mengarah pada sekularisasi atau de-Islamisasi, melainkan menghasilkan Islam Platformik: identitas hibrida yang adaptif sekaligus tangguh, di mana platform turut di-Islamisasi sebagaimana komunikasi Islam di-platformisasi. Studi ini berkontribusi pada teori mediatisasi, kajian living religion, dan studi politik Islam dalam demokrasi digital.

**Kata Kunci:** mediatisasi; masyarakat platform; identitas politik Islam; *living religion*; Islam Platformik.

## Pendahuluan

Eksistensi teknologi digital yang pesat telah secara fundamental mengubah ekspresi keagamaan dan keterlibatan politik di Indonesia. Platform media sosial telah berkembang melampaui alat komunikasi menjadi arena kontestasi ideologis, pembentukan identitas, dan mobilisasi politik bernuansa agama. Bagi partai politik Islam, transformasi ini menghadirkan paradoks yang mendalam: bagaimana mempertahankan integritas ideologis sambil berkembang dalam logika media sosial yang cair, populis, dan digerakkan oleh algoritma?

Paradoks ini sangat akut bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai Islam Indonesia yang berakar pada gerakan tarbiyah. PKS telah lama dikarakterisasikan sebagai partai kader yang disiplin dengan komitmen ideologis kuat terhadap nilai-nilai Islam. Sejak awal 2000-an, partai ini juga dibaca sebagai kasus uji bagi tesis moderasi partai Islam: pergeseran dari retorika syariah menuju agenda tata kelola, antikorupsi, dan kesejahteraan. Namun demikian, partai ini juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap komunikasi digital, secara aktif mengelola strategi media sosial multiplatform. Kasus ini memberikan peluang untuk mengkaji hubungan dinamis antara ideologi keagamaan dan logika platform dalam politik Islam kontemporer.

Penelitian yang ada telah mengkaji mediatisasi agama (Hjarvard, 2008), populisme Islam, dan komunikasi politik digital. Namun, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penelitian terintegrasi yang menjelaskan proses negosiasi internal dalam partai Islam, yakni ruang institusional tempat ideologi tidak sekadar "diencerkan" melainkan secara aktif dinegosiasikan sehingga melahirkan bentuk-bentuk identitas baru. Sebagian besar studi memposisikan media sebagai kekuatan dominan yang membentuk institusi keagamaan, namun gagal memperhitungkan peran aktif budaya organisasi dan agensi ideologis (Hjarvard, 2008).

Artikel ini mengatasi kesenjangan tersebut dengan mengkaji strategi komunikasi digital PKS melalui lensa model Negosiasi Dialektis. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bidang Komunikasi dan Informasi Digital (Komdigi) DPP PKS, observasi digital terhadap akun media sosial resmi, dan analisis dokumen partai, studi ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana PKS beradaptasi dengan logika media sosial; (2) bagaimana PKS mengakomodasi logika platform melalui objektifikasi nilai; dan (3) apa implikasi mediatisasi terhadap transformasi representasi identitas politik Islam?

Kebaruan artikel ini terletak pada pembalikan arah kausal yang lazim diasumsikan teori mediatisasi. Alih-alih membaca partai Islam sebagai pihak yang tunduk pada logika platform, artikel ini menunjukkan bahwa negosiasi berlangsung dua arah: pada saat yang sama ketika komunikasi Islam di-platformisasi, ruang platform itu sendiri turut di-Islamisasi melalui muatan nilai yang disirkulasikan di dalamnya. Hasilnya bukan sekularisasi, melainkan apa yang disebut artikel ini sebagai Islam Platformik (*platformized Islam*).

Dengan demikian artikel ini memberikan tiga kontribusi. Pertama, memperluas teori mediatisasi dengan menunjukkan bahwa pengaruh media dimediasi oleh agensi organisasi, sehingga menghasilkan negosiasi alih-alih dominasi (Hjarvard, 2008; Strömbäck, 2008). Kedua, memperkaya kajian living religion dengan menunjukkan

bahwa praktik keagamaan tidak hanya dihidupi dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga dimediasi dan diartikulasikan ulang dalam ruang digital (Ammerman, 2007; McGuire, 2008). Ketiga, menawarkan model konseptual Islam Platformik—identitas hibrida yang mempertahankan kontinuitas ideologis sambil merangkul logika platform—sebagai sumbangan bagi studi politik Islam dalam demokrasi digital.

## Kerangka Teoretis

### 1. Teori Mediatisasi dan Keterbatasannya

Teori mediatisasi klasik, yang dikembangkan Stig Hjarvard, berargumen bahwa media telah menjadi institusi sosial dengan logika tersendiri yang secara bertahap memengaruhi cara institusi sosial lain—termasuk agama—beroperasi (Hjarvard, 2008). Dalam perspektif ini, institusi keagamaan semakin bergantung pada logika media dan menyesuaikan praktik, struktur, serta komunikasinya dengan karakteristik media seperti visualitas, personalisasi, dramatisasi, dan popularitas.

Pada ranah politik, Jesper Strömbäck memilah mediatisasi ke dalam empat fase: media sebagai sumber informasi dominan; kemandirian relatif media dari institusi politik; adaptasi aktor politik terhadap logika media; dan internalisasi logika media ke dalam nalar aktor politik itu sendiri (Strömbäck, 2008). Skema ini berguna sebagai penanda derajat, tetapi tetap menyisakan pertanyaan yang menjadi fokus artikel ini: pada fase keempat, apakah internalisasi logika media selalu berarti tergerusnya logika normatif aktor?

Andreas Hepp memperluas perspektif ini melalui konsep *deep mediatization*, dengan argumen bahwa masyarakat kontemporer telah memasuki fase di mana media digital menjadi infrastruktur utama kehidupan sosial dan terintegrasi ke hampir seluruh praktik manusia (Hepp, 2020). Dalam kondisi ini, batas antara aktivitas daring dan luring semakin kabur, dan logika media menjadi konstitutif bagi realitas sosial. Knut Lundby bahkan mempersoalkan penggunaan istilah "logika media" dalam bentuk tunggal, karena praktik mediasi selalu jamak, situasional, dan bergantung pada konteks institusional penggunaannya (Lundby, 2009). Kritik ini penting bagi artikel ini karena membuka ruang analitis bagi variasi respons antar-institusi keagamaan terhadap tekanan yang sama.

Meskipun menyediakan kerangka penting, perspektif-perspektif ini tetap tidak memadai untuk menjelaskan agensi organisasi dalam partai politik Islam. Formulasi klasik cenderung terlalu menekankan dominasi media dan memposisikan institusi keagamaan sebagai objek pasif yang dibentuk kekuatan eksternal. Padahal, sebagaimana ditunjukkan penelitian terbaru, transformasi identitas politik Islam di ruang digital bukan sekadar akomodasi terhadap logika platform, melainkan melibatkan reartikulasi selektif.

Penelitian Setia Gumilar dan kolega tentang diplatformisasi legitimasi politik Islam pada pemilu Indonesia (2014–2024) menunjukkan bahwa wacana partai Islam semakin berorientasi platform, sementara kosakata moral Islam terus-menerus dirumuskan ulang ke dalam bentuk yang lebih kompatibel dengan keterbacaan platform (Gumilar et al., 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa mediatisasi politik Islam merupakan reartikulasi selektif alih-alih de-Islamisasi, karena nilai-nilai keagamaan tidak ditinggalkan tetapi dirumuskan ulang.

### 2. Masyarakat Platform: Datafikasi, Komodifikasi, dan Kurasi Algoritmik

Konsep masyarakat platform dari José van Dijck, Thomas Poell, dan Martijn de Waal menyediakan lapisan analitis yang tidak tercakup teori mediatisasi generasi awal. Menurut mereka, platform bekerja melalui tiga mekanisme inti: datafikasi, yakni pengubahan setiap interaksi menjadi data yang dapat diukur; komodifikasi, yakni pengubahan perhatian dan relasi menjadi nilai ekonomi; dan seleksi, yakni kurasi algoritmik yang menentukan apa yang terlihat dan apa yang tenggelam (Van Dijck et al., 2018). Ketiganya bukan sekadar fitur teknis melainkan tata kelola nilai: platform mendefinisikan ulang apa yang dianggap relevan, kredibel, dan layak disebarkan di ruang publik.

Implikasinya bagi aktor keagamaan bersifat struktural. Pesan keagamaan yang tidak terbaca oleh mekanisme seleksi platform tidak sekadar kurang populer—ia praktis tidak hadir dalam ruang publik digital. Karena itu, tuntutan agar nilai normatif diterjemahkan ke dalam format yang "terbaca platform" bukanlah pilihan estetis, melainkan syarat keberadaan. Kajian digital religion menunjukkan bahwa otoritas keagamaan di ruang digital selalu merupakan hasil negosiasi antara struktur teknologi dan struktur otoritas yang telah mapan. Kerangka inilah yang menjelaskan mengapa artikel ini menempatkan logika platform sebagai kutub yang setara—bukan sekadar sarana—dalam dialektika identitas.

### 3. Identitas Politik Islam sebagai Proyek yang Tak Pernah Selesai

Identitas dalam artikel ini tidak dipahami sebagai esensi yang tetap, melainkan sebagai produksi yang berlangsung terus-menerus dan tidak pernah selesai. Stuart Hall menegaskan bahwa identitas selalu dikonstruksi di dalam representasi, bukan di luarnya (Hall, 1996). Manuel Castells melengkapinya dengan tipologi identitas legitimasi, identitas resistensi, dan identitas proyek; yang terakhir merujuk pada aktor yang membangun identitas

baru untuk mereposisi dirinya dalam masyarakat sekaligus mentransformasikan struktur sosial (Castells, 1997). Dalam kerangka ini, apa yang dilakukan PKS di ruang digital lebih tepat dibaca sebagai kerja identitas proyek daripada sekadar pencitraan elektoral.

Secara historis, gagasan solidaritas kelompok sebagai daya gerak politik telah lama menjadi perhatian pemikiran Islam, sebagaimana tampak dalam pembahasan Ibn Khaldun mengenai 'aṣābiyah sebagai perekat kohesi yang menopang bangunan kekuasaan. Pada konteks Indonesia pascareformasi, kohesi semacam itu bekerja di dalam kerangka "Islam sipil" yang menautkan komitmen keagamaan dengan komitmen demokratik. Agama, dengan demikian, berfungsi sebagai sistem simbol yang menyediakan kerangka makna sekaligus disposisi bertindak, sehingga perubahan pada mediumnya berpotensi mengubah pula cara makna itu diproduksi.

#### 4. Living Religion: Praktik Keagamaan yang Hidup sebagai Agensi

Konsep living religion menawarkan koreksi penting terhadap teori media yang deterministik. Dikembangkan oleh Robert A. Orsi, Meredith B. McGuire, dan Nancy T. Ammerman, perspektif ini menekankan bahwa agama bukan sekadar sistem kepercayaan atau doktrin formal, melainkan seperangkat praktik, pengalaman, dan relasi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari (Ammerman, 2007; McGuire, 2008; Orsi, 1997). Agama memperoleh makna melalui cara individu dan komunitas mempraktikkan, menegosiasikan, dan menautkan nilai keagamaan dengan tantangan sehari-hari.

Dalam konteks Indonesia, perspektif ini diperkaya penelitian yang menunjukkan bagaimana Islam dipraktikkan melalui tradisi budaya, gerakan sosial, dan organisasi komunitas. Penelitian Nafik Muthohirin menunjukkan bahwa fundamentalisme Islam bertransformasi melalui dakwah digital, dengan pendakwah muda membangun otoritas keagamaan melalui konten kreatif tentang politik Islam, gerakan hijrah, dan ideologi Salafi. Ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan tidak sekadar dimediasi teknologi, tetapi secara aktif dibentuk melalui keterlibatan digital.

Perspektif living religion sangat relevan untuk memahami PKS karena identitas ideologis partai bukan sekadar dokumen formal, melainkan budaya organisasi yang hidup. Sistem tarbiyah, pelatihan kader, kegiatan kesejahteraan sosial, dan pengabdian masyarakat merupakan perwujudan nilai Islam dalam praktik sehari-hari. Praktik-praktik ini menyediakan fondasi kontinuitas ideologis yang memungkinkan partai beradaptasi dengan perubahan lingkungan komunikasi tanpa kehilangan orientasi normatifnya.

#### 5. Objektifikasi Islam: Dari Simbol menuju Praksis

Konsep objektifikasi yang dikembangkan Kuntowijoyo dalam tradisi intelektual Islam Indonesia menyediakan mekanisme penting untuk memahami bagaimana nilai Islam diterjemahkan ke dalam tindakan publik. Objektifikasi adalah proses mentransformasikan nilai normatif Islam menjadi praktik sosial universal yang dapat diterima seluruh warga negara tanpa kehilangan fondasi etis dan keagamaannya (Kuntowijoyo, 1997). Melalui objektifikasi, Islam tidak berhenti sebagai identitas simbolis, melainkan terwujud dalam keadilan, pelayanan, profesionalisme, dan kepedulian terhadap kesejahteraan publik.

Perlu ditegaskan bahwa objektifikasi berbeda secara kategoris dari sekularisasi dalam pengertian klasik. Tesis sekularisasi mengandaikan menyusutnya jangkauan kanopi suci atas kehidupan publik seiring diferensiasi kelembagaan modern (Berger, 1967). Objektifikasi justru bergerak ke arah sebaliknya: nilai keagamaan diperluas jangkauan publiknya dengan cara menanggalkan partikularitas simboliknya, bukan menanggalkan fondasi normatifnya. Distingsi ini menjadi kunci untuk membaca temuan artikel ini.

Konsep ini memiliki relevansi khusus dalam masyarakat platform, tempat komunikasi harus beresonansi dengan audiens yang beragam dan plural. Ketika nilai Islam diobjektifikasikan menjadi barang publik universal—kesejahteraan sosial, antikorupsi, ketahanan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi—nilai tersebut menjadi lebih komunikatif dan dapat diterima publik yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak berbagi komitmen ideologis partai.

#### 6. Sintesis: Kerangka Negosiasi Dialektis

Berlandaskan sumber-sumber teoretis di atas, artikel ini mengusulkan model Negosiasi Dialektis yang mengintegrasikan teori mediatisasi, kerangka masyarakat platform, perspektif living religion, dan konsep objektifikasi (Ammerman, 2007; Hjarvard, 2008; Kuntowijoyo, 1997; McGuire, 2008; Van Dijck et al., 2018). Model ini menyatakan bahwa transformasi identitas politik Islam dalam masyarakat platform bukanlah proses linier dominasi media, melainkan negosiasi dinamis dan berkelanjutan antara tiga komponen:

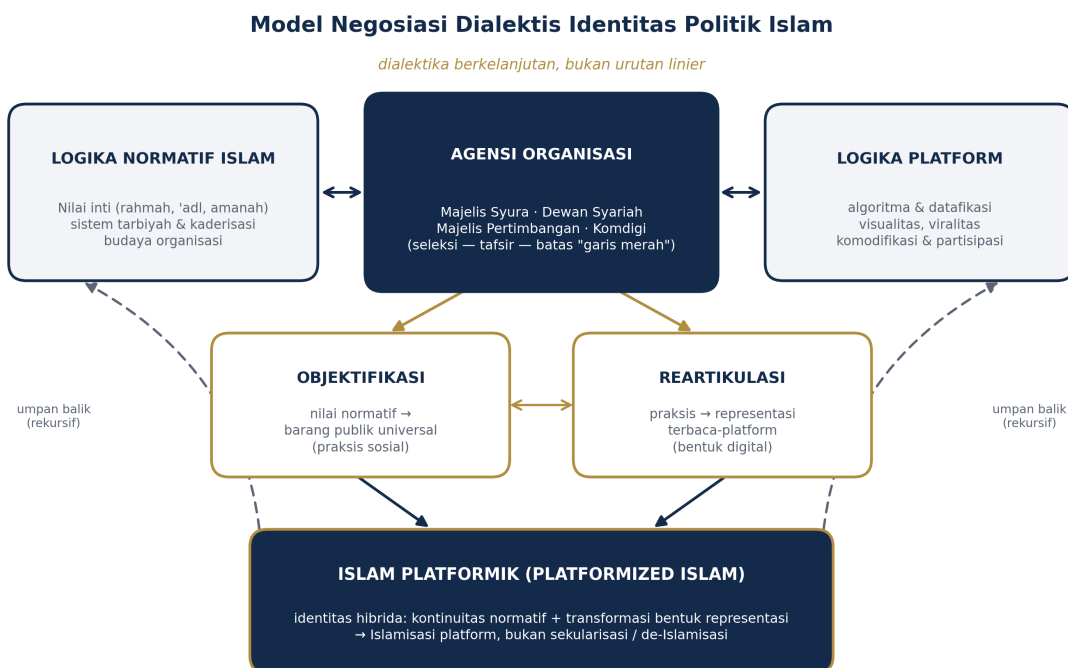
- 1) Logika Normatif: nilai inti Islam partai, budaya organisasi, dan komitmen ideologis yang relatif konstan lintas perubahan medium.
- 2) Logika Platform: tuntutan algoritma, metrik keterlibatan, budaya visual, ekonomi perhatian, dan komunikasi partisipatif.
- 3) Agensi Organisasi: kapasitas struktur institusional partai—Majelis Syura, Dewan Syariah, Majelis

Pertimbangan Partai, dan Komdigi—untuk memilih, menafsirkan, menyesuaikan, dan membatasi logika platform berdasarkan pertimbangan ideologis.

Dari kerangka tersebut diturunkan empat proposisi yang diuji secara empiris pada bagian temuan. Pertama, semakin kuat kapasitas agensi organisasi, semakin selektif adaptasi terhadap logika platform. Kedua, adaptasi berlangsung pada tataran bentuk representasi, sedangkan substansi normatif dipertahankan melalui mekanisme pengawasan internal. Ketiga, objektifikasi berfungsi sebagai jembatan penerjemahan yang memungkinkan nilai partikular menjadi terbaca-platform tanpa kehilangan rujukan normatifnya. Keempat, hasil negosiasi bersifat rekursif: representasi digital yang dihasilkan kembali memengaruhi cara nilai normatif dipahami dan dipraktikkan oleh kader.

Hasil negosiasi ini bukanlah kemenangan satu logika atas logika lain, melainkan munculnya bentuk representasi baru yang mempertahankan kontinuitas ideologis sambil beradaptasi dengan karakteristik platform. Bentuk representasi inilah yang disebut artikel ini sebagai Islam Platformik (platformized Islam)—identitas hibrida yang adaptif sekaligus tangguh. Model tersebut divisualisasikan pada Gambar 1.

**Gambar 1. Model Negosiasi Dialektis Identitas Politik Islam**



Sumber: konstruksi penulis berdasarkan sintesis kerangka teoretis dan temuan lapangan.

## Metode

Studi ini menggunakan desain studi kasus kualitatif tunggal (*single-case study*) dengan PKS sebagai unit analisis. PKS dipilih sebagai kasus khas (*typical case*) partai Islam berkomitmen ideologis kuat yang menunjukkan adaptasi signifikan terhadap komunikasi digital. Mengikuti logika generalisasi analitis, temuan dari kasus ini diarahkan untuk memperluas proposisi teoretis, bukan untuk digeneralisasi secara statistik ke populasi partai (Yin, 2018, pp. 36–54).

Tiga sumber data utama digunakan secara komplementer.

*Pertama*, wawancara mendalam semiterstruktur dengan pejabat kunci Bidang Komunikasi dan Informasi Digital (Komdigi) DPP PKS pada 23 April 2026 di kantor DPP PKS, Jakarta, yaitu sekretaris bidang dan kepala strategi komunikasi digital. Informan dipilih secara *purposive* karena keterlibatan langsung mereka dalam perumusan strategi komunikasi digital dan akses mereka terhadap proses pengambilan keputusan internal. Wawancara berlangsung sekitar [\_\_\*] menit, direkam atas persetujuan informan, ditranskripsikan secara verbatim, dan diverifikasi ulang melalui *member check*.

*Kedua*, observasi digital nonpartisipatif terhadap akun media sosial resmi PKS selama periode Januari 2025–April 2026, meliputi Instagram (@pksejahtera), X (@PKSejahtera), TikTok (@pksejahtera), Facebook (Partai

*Keadilan Sejahtera*), dan YouTube (PKSTV), serta kanal koordinasi kelembagaan kampanye.pks.id dan medsos.pks.id. Korpus yang dianalisis berjumlah [<sub>\*</sub>] unggahan yang mencakup foto, korsel, reels, infografik, video, dan interaksi komunitas, didokumentasikan melalui tangkapan layar bertanggal dengan skema penomoran arsip untuk keperluan audit.

*Ketiga*, analisis dokumen partai, meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), publikasi ideologis *Islam & NKRI: Objektifikasi Nilai-Nilai Islam dalam Ruang Kebhinekaan Indonesia*, pernyataan resmi pimpinan partai, dan dokumentasi internal Komdigi yang dapat diakses peneliti.

Analisis data mengikuti pendekatan terintegrasi yang menggabungkan tiga lapisan analitis. *Analisis tekstual* mengkaji tema konten, narasi, representasi visual, dan elemen simbolik dalam unggahan media sosial. *Analisis organisasi* melacak proses produksi komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan koordinasi antara Komdigi dan struktur partai. *Analisis platform* memetakan karakteristik algoritmik, pola keterlibatan, dan mekanisme visibilitas yang membentuk komunikasi digital PKS.

Pengodean dilakukan dalam dua tahap. Pengodean terbuka menghasilkan kode-kode deskriptif dari transkrip dan korpus konten; pengodean aksial kemudian mengelompokkannya ke dalam lima kategori analitis: adaptasi, akomodasi, negosiasi, transformasi, dan objektifikasi. Kategori-kategori inilah yang menjadi kerangka penyajian temuan pada bagian berikutnya.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (wawancara, konten digital, dokumen), triangulasi metode, *member check* atas kutipan yang digunakan, serta penyusunan jejak audit berupa arsip tangkapan layar bertanggal dan transkrip. Seluruh informan memberikan persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*); identitas informan disajikan dalam bentuk kode (I-1 dan I-2) sesuai kesepakatan penggunaan data pada publikasi jurnal.

Studi ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dinyatakan secara terbuka. *Pertama*, sebagai studi kasus tunggal, temuannya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh partai Islam. *Kedua*, data wawancara bersumber dari tingkat elite produsen pesan sehingga tidak menangkap resepsi audiens; klaim mengenai efektivitas komunikasi karenanya bersifat inferensial dan memerlukan pengujian lanjutan melalui studi khalayak. *Ketiga*, metrik platform bersifat sangat dinamis, sehingga seluruh angka yang disajikan terikat pada waktu pengambilan data. *Keempat*, akses terhadap dokumentasi internal partai bersifat terbatas dan terkurasi oleh partai itu sendiri.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Adaptasi terhadap Logika Media Sosial

PKS secara sistematis beradaptasi dengan logika media sosial melalui beberapa strategi. Pertama, partai membentuk Bidang Komunikasi dan Informasi Digital (Komdigi) sebagai struktur khusus pengelola komunikasi digital. Institusionalisasi ini menandakan bahwa komunikasi digital tidak lagi dipandang sebagai fungsi pendukung, melainkan sebagai aktivitas strategis yang sentral bagi operasi politik partai. Dalam kerangka Strömbäck, langkah ini menempatkan PKS pada fase ketiga menuju keempat mediatisasi: logika media tidak hanya diadaptasi, tetapi mulai terinternalisasi ke dalam desain kelembagaan partai (Strömbäck, 2008).

Tim Komdigi melakukan pemantauan harian terhadap isu publik dan berkoordinasi dengan sekitar 53 bidang dan badan partai untuk memproduksi konten. Proses produksi mengikuti alur kerja terstruktur: identifikasi isu, penyusunan pernyataan resmi, transformasi konten ke dalam format spesifik platform (poster, video, korsel, infografik), penjadwalan publikasi, dan evaluasi kinerja melalui analitik.

**Tabel 1. Ekosistem Digital Multiplatform PKS**

| Platform    | Akun resmi                | Skala audiens     | Karakteristik konten            | Fungsi utama                           |
|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Instagram   | @pk_sejahtera             | 406.000+ pengikut | Foto, korsel, reels, infografik | Pencitraan dan komunikasi publik       |
| X (Twitter) | @PKSejahtera              | 408.000+ pengikut | Teks, tautan, respons isu       | Respons cepat terhadap isu politik     |
| Facebook    | Partai Keadilan Sejahtera | 1.038.579+ suka   | Unggahan panjang, tautan berita | Jangkauan lintas generasi              |
| TikTok      | @pksejahtera              | [lengkapi]        | Video pendek                    | Keterlibatan pemuda dan edukasi publik |
| YouTube     | PKSTV                     | [lengkapi]        | Video panjang                   | Dokumentasi dan publikasi komprehensif |

| Situs web           | pks.id                            | — | Artikel, rilis<br>pers, dokumen | Pusat<br>informasi resmi              |
|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Kanal<br>koordinasi | kampanye.pks.id;<br>medsos.pks.id | — | Panduan dan<br>materi kampanye  | Sinkronisasi<br>pesan lintas struktur |

Sumber: observasi digital penulis; data audiens dan bersifat dinamis.

Kedua, PKS beradaptasi dengan budaya visual. Data wawancara mengungkapkan bahwa partai secara sengaja beralih dari komunikasi yang didominasi teks menuju format visual, dengan kesadaran bahwa audiens kini mengonsumsi konten visual sebelum membaca keterangan. Adaptasi ini terlihat dalam dominasi penggunaan foto, infografik, reels, dan video pendek di seluruh platform. Sebagaimana dijelaskan salah satu informan: "Kalau dulu orang membaca berita dulu baru melihat gambar, sekarang justru sebaliknya. Mereka melihat visual lebih dahulu. Karena itu setiap konten yang kami produksi harus bisa berbicara bahkan sebelum caption dibaca."

Ketiga, PKS beradaptasi dengan logika algoritma. Informan menjelaskan bahwa tim memantau metrik keterlibatan, jangkauan, tayangan, pembagian, dan pola komentar untuk mengevaluasi efektivitas konten. Waktu publikasi dioptimalkan untuk keterlibatan puncak, dan format konten disesuaikan dengan preferensi algoritmik masing-masing platform. Praktik ini merupakan wujud konkret dari apa yang oleh Van Dijck et al. (2018) disebut datafikasi: kinerja dakwah politik partai kini sebagian dinilai melalui satuan-satuan yang disediakan platform.

Keempat, PKS beradaptasi dengan budaya partisipatif. Media sosial tidak lagi dipandang sebagai saluran komunikasi satu arah, melainkan sebagai ruang dialog dan partisipasi audiens. Informan mencatat bahwa interaksi komunitas melalui komentar, pembagian, pengunggahan ulang, dan pesan langsung dikelola secara aktif dan dianggap sebagai indikator kunci keberhasilan komunikasi.

## 2. Akomodasi melalui Objektifikasi Nilai-Nilai Islam

Di luar adaptasi taktis, PKS secara strategis mengakomodasi logika platform melalui objektifikasi nilai-nilai Islam. Ini merupakan transformasi yang lebih fundamental: menerjemahkan nilai Islam yang abstrak menjadi barang publik yang konkret dan universal sehingga beresonansi dengan audiens platform yang plural (Kuntowijoyo, 1997).

**Tabel 2. Objektifikasi Nilai-Nilai Islam dalam Komunikasi Digital PKS**

| Nilai Islam             | Bentuk objektifikasi                | Representasi di platform                          |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Rahmah (kasih sayang)   | Pelayanan masyarakat                | Dokumentasi aksi sosial dan pengabdian masyarakat |
| 'Adl (keadilan)         | Advokasi kebijakan                  | Pernyataan kebijakan publik dan konten edukasi    |
| Ukhuwah (persaudaraan)  | Solidaritas kemanusiaan             | Kampanye kemanusiaan dan respons bencana          |
| Amānah (amanah)         | Profesionalisme pelayanan publik    | Konten etika pemerintahan dan antikorupsi         |
| Maṣlaḥah (kemaslahatan) | Pemberdayaan ekonomi dan pendidikan | Liputan UMKM dan konten ketahanan keluarga        |

Sumber: analisis penulis atas korpus konten digital resmi PKS, Januari 2025–April 2026.

Objektifikasi ini tampak dalam tema dominan konten digital PKS. Berdasarkan observasi, kategori yang paling sering muncul meliputi: (1) pelayanan masyarakat dan kesejahteraan sosial; (2) solidaritas kemanusiaan; (3) pemberdayaan keluarga dan pemuda; (4) pemberdayaan ekonomi; dan (5) persatuan nasional. Dalam korpus yang diamati, tema-tema tersebut secara konsisten memperoleh respons audiens yang lebih luas dibandingkan konten yang secara eksplisit ideologis-simbolik.

Contoh yang menonjol adalah konten relawan PKS yang menyediakan layanan perbaikan sepeda motor gratis di Aceh Tamiang, yang memperoleh jangkauan luar biasa luas dibanding konten sejenis pada periode yang sama. Konten ini merepresentasikan nilai Islam bukan melalui simbol keagamaan, melainkan melalui tindakan nyata yang menunjukkan kasih sayang dan pelayanan. Sebagaimana dijelaskan informan: "Kami ingin masyarakat melihat manfaatnya terlebih dahulu. Ketika masyarakat melihat pelayanan, kepedulian, dan kerja nyata, di situlah nilai-nilai Islam hadir secara nyata."

Dokumen ideologis partai memperkuat orientasi ini. Publikasi *Islam & NKRI: Objektifikasi Nilai-Nilai Islam dalam Ruang Kebhinekaan Indonesia* secara eksplisit menyatakan bahwa nilai Islam harus diwujudkan sebagai manfaat publik bagi seluruh warga negara Indonesia, bukan sekadar identitas kelompok yang eksklusif. Dokumen ini memberikan legitimasi normatif bagi strategi objektifikasi, sekaligus menunjukkan bahwa objektifikasi bukan improvisasi tim komunikasi melainkan kebijakan ideologis partai.

### 3. Mekanisme Negosiasi Dialektis

Temuan paling signifikan adalah bekerjanya mekanisme negosiasi dialektis yang memediasi identitas ideologis dan logika platform. Mekanisme ini beroperasi melalui agensi organisasi: mempertahankan "garis merah" ideologis partai sambil memungkinkan komunikasi yang adaptif.

Pertama, negosiasi terjadi melalui pengawasan internal. Informan menjelaskan bahwa meskipun Komdigi memiliki kebebasan kreatif untuk berinovasi sesuai karakteristik platform, seluruh konten harus melalui proses validasi untuk isu yang sensitif secara ideologis. Dewan Syariah dan Majelis Pertimbangan Partai memberikan pengawasan terhadap konten yang menyentuh doktrin keagamaan, nilai-nilai Islam, dan topik ideologis sensitif.

Kedua, negosiasi terjadi melalui perbedaan antara bentuk dan substansi. Sebagaimana ditegaskan informan: "Kreativitas itu penting, tetapi tetap ada garis merah. Kami boleh menggunakan berbagai format komunikasi yang sesuai dengan platform, tetapi substansi dan nilai yang dibawa tetap harus mencerminkan identitas PKS."

Ketiga, negosiasi melibatkan artikulasi inklusivitas tanpa fleksibilitas ideologis. Temuan penting di sini adalah perbedaan yang dilakukan informan antara "fleksibel" dan "inklusif". Meskipun PKS terbuka terhadap audiens yang beragam, termasuk non-Muslim dalam konteks organisasi tertentu, inklusivitas tersebut tidak disamakan dengan fleksibilitas ideologis: "Kalau kami sebenarnya menyebutnya inklusif. Inklusif berbeda dengan fleksibel. Kalau fleksibel itu ke mana saja bisa berubah. Inklusif itu punya pondasi, tetapi tetap terbuka kepada siapa saja."

Ketiga mekanisme tersebut dapat dipetakan ke dalam matriks ranah negosiasi berikut, yang memperlihatkan bahwa yang dinegosiasikan adalah bentuk, sedangkan yang dipertahankan adalah substansi.

**Tabel 3. Matriks Ranah Negosiasi dan Garis Merah Ideologis**

| Ranah             | Dapat dinegosiasikan (bentuk)                          | Tidak dinegosiasikan (substansi)                   | Aktor pengawas              |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Format            | Korsel, reels, meme, video pendek, gaya bahasa populer | Larangan format yang merendahkan kehormatan dakwah | Komdigi                     |
| Bahasa            | Terminologi inklusif dan istilah keseharian            | Prinsip kebenaran ajaran yang dirujuk              | Komdigi; Dewan Syariah      |
| Isu               | Prioritas isu mengikuti percakapan publik              | Posisi partai atas isu akidah dan syariat          | Dewan Syariah               |
| Personalisasi     | Sisi personal pemimpin (keluarga, olahraga, pelayanan) | Batas privasi dan adab representasi kader          | Majelis Pertimbangan Partai |
| Kemitraan audiens | Keterbukaan pada audiens lintas identitas (inklusif)   | Penolakan fleksibilitas ideologis                  | Majelis Syura               |

Sumber: analisis penulis atas data wawancara dan dokumen partai.

### 4. Islam Platformik: Pembentukan Identitas Hibrida

Hasil negosiasi dialektis ini adalah munculnya Islam Platformik—identitas hibrida yang mempertahankan kontinuitas ideologis sambil menyesuaikan bentuk representasinya dengan masyarakat platform. Hibriditas ini terwujud dalam empat dimensi.

Pertama, pergeseran dari representasi simbolik menuju performatif. Identitas Islam semakin ditunjukkan melalui tindakan sosial dan pelayanan alih-alih simbol keagamaan eksplisit; identitas partai dikenali melalui apa yang dilakukannya lebih daripada apa yang dideklarasikannya.

Kedua, penerjemahan bahasa ideologis ke dalam wacana universal. Terminologi keagamaan diterjemahkan ke dalam bahasa inklusif—keadilan, kesejahteraan, pelayanan, etika, profesionalisme—yang beresonansi dengan audiens beragam.

Ketiga, personifikasi nilai melalui pemimpin. Pemimpin partai dipersonalisasi melalui konten yang dekat dengan keseharian (olahraga, keluarga, pelayanan masyarakat) alih-alih disajikan semata melalui pembingkai ideologis formal.

Keempat, integrasi identitas nasional dan keagamaan. Nasionalisme diartikulasikan sebagai bagian integral dari identitas Islam, memposisikan partai dalam kerangka nasional Indonesia yang plural alih-alih sebagai gerakan keagamaan eksklusif.

Identitas hibrida ini merupakan temuan yang signifikan: PKS tidak meninggalkan fondasi Islamnya, tetapi juga tidak sepenuhnya tunduk pada logika platform. Sebaliknya, partai mengembangkan bentuk representasi baru yang mempertahankan kontinuitas normatif sambil mencapai efektivitas komunikatif dalam masyarakat platform.

## Pembahasan: Mengurai Model Negosiasi Dialektis

Temuan ini menantang asumsi deterministik dalam teori mediatisasi klasik. Meskipun PKS jelas beradaptasi dengan logika media—melalui budaya visual, optimasi algoritma, dan komunikasi partisipatif—adaptasi tersebut bukanlah proses pasif dominasi media. Struktur organisasi dan komitmen ideologis partai berfungsi sebagai penjaga gerbang aktif yang menyaring logika platform melalui kerangka normatif. Dengan demikian, proposisi pertama dan kedua kerangka teoretis memperoleh dukungan empiris: kapasitas agensi organisasi menentukan derajat selektivitas adaptasi, dan negosiasi berlangsung pada tataran bentuk, bukan substansi (Hjarvard, 2008; Strömbäck, 2008).

Temuan ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa politik Islam yang diplatformisasi di Indonesia merupakan reartikulasi selektif alih-alih de-Islamisasi (Gumilar et al., 2026). Kosakata moral Islam terus-menerus dirumuskan ulang ke dalam bentuk yang lebih kompatibel dengan keterbacaan platform dan resonansi elektoral, namun kerangka etis intinya tetap utuh. Konsistensi ini juga menegaskan kritik Lundby (2009) bahwa "logika media" tidak pernah tunggal: yang terjadi adalah perjumpaan antara pluralitas logika platform dan pluralitas logika institusional.

Konsep objektifikasi memberikan wawasan penting tentang bagaimana nilai Islam diterjemahkan untuk masyarakat platform. Ketika nilai seperti rahmah direpresentasikan melalui konten pelayanan, atau 'adl melalui video advokasi, nilai-nilai tersebut menjadi "terbaca platform" sekaligus relevan secara sosial (Kuntowijoyo, 1997; Van Dijck et al., 2018).

Proses ini memperluas formulasi asli Kuntowijoyo. Objektifikasi pada era digital tidak berhenti pada penerjemahan nilai ke dalam tindakan sosial, tetapi berlanjut pada penerjemahan tindakan sosial ke dalam representasi digital. Objektifikasi kini bekerja melalui dua dimensi simultan: praksis sosial dan representasi digital. Kegiatan pelayanan sosial partai menjadi konten media, dan konten itu sendiri merupakan bentuk objektifikasi karena membuat nilai menjadi terlihat dan komunikatif. Inilah yang disebut artikel ini sebagai mediatisasi ganda.

Konsekuensi teoretisnya penting. Jika objektifikasi berlangsung pula pada tataran representasi, maka risiko yang menyertainya bukan hilangnya nilai, melainkan bergesernya kriteria keberhasilan dakwah politik ke arah satuan-satuan yang disediakan platform. Di titik inilah mekanisme pengawasan internal partai memperoleh signifikansi teoretis, bukan sekadar administratif (Van Dijck et al., 2018).

Argumen inti artikel ini adalah bahwa arah pengaruh dalam mediatisasi politik Islam bersifat dua arah. Pembacaan konvensional menempatkan platform sebagai variabel bebas yang mengikis partikularitas keagamaan. Data pada kasus PKS menunjukkan pola yang berbeda: sembari komunikasi Islam disesuaikan dengan afordansi platform, ruang platform itu sendiri diisi, diberi bingkai moral, dan dinormalisasi dengan muatan nilai keagamaan yang diobjektifikasikan. Proses ini lebih tepat disebut Islamisasi platform daripada sekularisasi komunikasi Islam.

Klaim ini konsisten dengan distingsi Kuntowijoyo (1997) yang dibahas pada Bagian 2.5. Objektifikasi menanggalkan partikularitas simbolik demi jangkauan publik, bukan menanggalkan rujukan normatif. Karena itu berkurangnya penanda simbolik dalam konten digital PKS tidak dapat langsung dibaca sebagai berkurangnya keislaman pesan—sebuah kekeliruan inferensi yang kerap muncul ketika tesis sekularisasi Berger (1967) diterapkan tanpa perantara pada data digital.

Namun perlu ditegaskan batas klaim ini. Islamisasi platform yang dimaksud beroperasi pada tataran wacana dan representasi, bukan pada tataran arsitektur teknis atau tata kelola platform yang tetap dikendalikan korporasi global. Dengan kata lain, yang di-Islamisasi adalah isi dan bingkai moral percakapan, bukan infrastrukturnya.

Konsep Islam Platformik menangkap identitas hibrida yang muncul dari negosiasi dialektis ini. Islam Platformik bukanlah Islam tradisional yang murni, bukan pula identitas yang sepenuhnya larut dalam platform; ia mewakili ruang ketiga tempat kontinuitas dan perubahan hadir secara simultan. Sebagaimana ditunjukkan Gambar 1, relasi antarkomponen bersifat rekursif: representasi digital yang dihasilkan kembali memengaruhi cara kader memahami dan mempraktikkan nilai normatif—sesuai proposisi keempat kerangka teoretis.

Model ini memiliki implikasi bagi pemahaman politik Islam dalam demokrasi digital. Ia menunjukkan bahwa mediatisasi tidak selalu berujung pada sekularisasi atau pelemahan ideologis; sebaliknya, mediatisasi dapat menghasilkan bentuk identitas keagamaan yang lebih tangguh dan adaptif, yang mempertahankan fondasi etis sambil mencapai efektivitas komunikatif. Model ini juga menegaskan pentingnya agensi organisasi: tanpa mekanisme pengawasan kelembagaan, adaptasi berpotensi menjadi erosi ideologis; dengan budaya organisasi yang kuat, sistem kaderisasi, dan pengawasan ideologis, adaptasi menjadi proses terkendali yang memperkuat alih-alih melemahkan identitas.

Kejujuran analitis menuntut pertimbangan atas tafsir tandingan. Temuan yang sama dapat dibaca sebagai gejala de-ideologisasi terkelola: berkurangnya penanda simbolik dan menguatnya wacana kesejahteraan dapat dipahami sebagai konsekuensi kompetisi elektoral di pasar pemilih tengah, sebagaimana diargumentasikan literatur tentang kemunduran politik Islam dan surutnya populisme Islam di Indonesia. Dalam pembacaan ini, objektifikasi adalah nama lain bagi moderasi yang didorong insentif elektoral, bukan strategi normatif yang berakar pada tradisi intelektual Islam.

Artikel ini tidak menutup kemungkinan tersebut, tetapi mengajukan dua alasan mengapa pembacaan dialektis lebih memadai untuk kasus ini. Pertama, terdapat basis doktrinal yang mendahului tekanan elektoral, yakni rujukan objektifikasi dalam dokumen ideologis partai yang menempatkan manfaat publik sebagai perwujudan nilai Islam. Kedua, terdapat mekanisme institusional yang secara aktif menolak fleksibilitas ideologis, sebagaimana ditunjukkan pembedaan "inklusif" versus "fleksibel" dan keberadaan pengawasan Dewan Syariah atas isu akidah. Meski demikian, karena data penelitian ini bersumber dari elite produsen pesan, pengujian yang lebih meyakinkan atas kedua tafsir tersebut menuntut studi resepsi khalayak dan analisis longitudinal lintas siklus elektoral.

Artikel ini berkontribusi secara teoritis pada tiga hal: Pertama, studi ini memperluas teori mediatisasi dengan menunjukkan bahwa pengaruh media dimediasi oleh agensi organisasi. Hubungan antara media dan agama bukanlah deterministik melainkan dialektis, sehingga menghasilkan negosiasi alih-alih adaptasi sederhana (Hjarvard, 2008; Strömbäck, 2008). Temuan ini menantang penekanan berlebihan pada dominasi media dalam formulasi klasik.

Kedua, studi ini memperkaya kajian living religion dengan menunjukkan bahwa praktik keagamaan tidak hanya dihidupi dalam ruang sosial sehari-hari, tetapi juga dimediasi dan diartikulasikan ulang melalui platform digital (Ammerman, 2007; McGuire, 2008; Orsi, 1997). Masyarakat platform telah menjadi arena baru tempat agama dipraktikkan, dinegosiasikan, dan diberi makna baru—memperluas cakupan living religion dari pengalaman sosial ke pengalaman sosial yang termediasi.

Ketiga, studi ini menawarkan model konseptual Islam Platformik sebagai sumbangan bagi studi politik Islam dalam demokrasi digital. Islam Platformik merupakan bentuk ketangguhan adaptif tempat identitas mempertahankan kontinuitas normatif sambil mentransformasikan bentuk representasi. Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana partai Islam dapat menavigasi antara komitmen ideologis dan tuntutan platform tanpa tereduksi menjadi salah satunya.

## Simpulan

Artikel ini mengkaji bagaimana Partai Keadilan Sejahtera menavigasi ketegangan antara mempertahankan identitas politik Islam dan beradaptasi dengan logika media sosial dalam masyarakat platform Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa PKS mengembangkan pola Negosiasi Dialektis yang mempertahankan kontinuitas normatif sambil mentransformasikan bentuk representasi.

Studi ini menunjukkan bahwa PKS secara sistematis beradaptasi dengan logika media sosial melalui budaya visual, optimasi algoritma, dan komunikasi partisipatif. Lebih signifikan lagi, partai mengakomodasi logika platform melalui objektifikasi nilai Islam—menerjemahkan prinsip keagamaan yang abstrak menjadi barang publik universal seperti kesejahteraan sosial, keadilan, pelayanan, dan antikorupsi. Objektifikasi tersebut berlangsung melalui mekanisme pengawasan organisasi yang mempertahankan "garis merah" ideologis sambil memungkinkan komunikasi yang kreatif.

Hasil negosiasi dialektis ini adalah Islam Platformik: identitas hibrida yang tetap berlandaskan ideologi sambil efektif secara komunikatif dalam masyarakat platform. Islam Platformik menunjukkan bahwa mediatisasi tidak selalu mengarah pada sekularisasi atau de-Islamisasi, melainkan dapat menghasilkan ketangguhan adaptif—bahkan, pada tataran wacana, menghasilkan Islamisasi platform. Kosakata moral Islam terus dirumuskan ulang ke dalam bentuk yang kompatibel dengan keterbacaan platform dan resonansi publik, sementara kerangka etis intinya tetap utuh.

Dengan demikian studi ini berkontribusi pada teori mediatisasi dengan menunjukkan bahwa pengaruh media dimediasi oleh agensi organisasi; pada kajian living religion dengan menunjukkan bahwa praktik keagamaan dimediasi dan diartikulasikan ulang di ruang digital; dan pada studi politik Islam dengan menawarkan konsep Islam Platformik sebagai kerangka untuk memahami ketangguhan adaptif dalam demokrasi digital.

Penelitian selanjutnya perlu menguji keberlakuan model ini pada partai, gerakan, dan organisasi Islam lain, serta melengkapinya dengan studi resepsi khalayak untuk menguji apakah identitas hibrida yang diproduksi di tingkat elite benar-benar diterima sebagaimana dimaksudkan. Selain itu, peran kecerdasan buatan dan tata kelola algoritma dalam membentuk komunikasi politik Islam layak diselidiki lebih lanjut seiring terus berkembangnya masyarakat platform.

## Daftar Pustaka

- Ammerman, Nancy T. *Sacred Stories, Spiritual Tribes: Finding Religion in Everyday Life*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Berger, Peter L. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books, 1967.
- Campbell, Heidi A., ed. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. London: Routledge, 2013.

- Castells, Manuel. *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Couldry, Nick, and Andreas Hepp. *The Mediated Construction of Reality*. Cambridge: Polity Press, 2017.
- Fakhrurroji, Mochammad. *Mediatisasi Agama: Konsep, Kasus, dan Implikasi*. Bandung: Lekkass, 2021.
- Fealy, Greg. "The Prosperous Justice Party (PKS) and the Decline of Political Islam in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 38, no. 1 (2008): 29–49.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Gumilar, Setia, Ahmad Ali Nurdin, and M. Taufiq Rahman. "Platformizing Islamic Political Legitimacy across the 2014–2024 Indonesian Election." *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2026): 84–113.
- Hadiz, Vedi R. "Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia." *Third World Quarterly* 39, no. 10 (2018): 1953–1969.
- Hall, Stuart. "Cultural Identity and Diaspora." In *Identity: Community, Culture, Difference*, edited by Jonathan Rutherford, 222–237. London: Lawrence & Wishart, 1990.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Hepp, Andreas. *Cultures of Mediatization*. Cambridge: Polity Press, 2013.
- Hepp, Andreas. *Deep Mediatization*. London: Routledge, 2020.
- Hjarvard, Stig. "The Mediatization of Society: A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change." *Nordicom Review* 29, no. 2 (2008): 101–134.
- Hjarvard, Stig. *The Mediatization of Culture and Society*. London: Routledge, 2013.
- Ibn Khaldun. *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Translated by Franz Rosenthal. Princeton: Princeton University Press, 1967.
- Informan I-1. Wawancara oleh peneliti. Bidang Komunikasi dan Informasi Digital DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, 23 April 2026.
- Informan I-2. Wawancara oleh peneliti. Bidang Komunikasi dan Informasi Digital DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, 23 April 2026.
- Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan, 2001.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.
- Lundby, Knut, ed. *Mediatization of Communication*. Handbooks of Communication Science 21. Berlin: De Gruyter Mouton, 2014.
- Machmudi, Yon. *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. Canberra: ANU Press, 2008.
- Maulana, R. G., dan Y. Djuyandi. "Strategi Komunikasi Politik PKS dalam Mempertahankan Konstituen di Jawa Barat Melalui Instagram." *Jurnal Studi Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2023): 78–86.
- McGuire, Meredith B. *Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Mietzner, Marcus. "The Decline of Islamic Populism in Indonesia." *Journal of Democracy* 31, no. 3 (2020): 126–140.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Muthohirin, N. "Faith in the Digital Age: The Rise of Islamic Fundamentalism and the Plurality of Young Muslims' Piety on Social Media." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 2 (2025): 199–233.
- Orsi, Robert A. *Between Heaven and Earth: The Religious Worlds People Make and the Scholars Who Study Them*. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- Partai Keadilan Sejahtera. *Islam & NKRI: Objektifikasi Nilai-Nilai Islam dalam Ruang Kebhinekaan Indonesia*. Serial Ideologi No. 17. Jakarta: DPP PKS, 2026.
- Strömbäck, Jesper. "Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics." *The International Journal of Press/Politics* 13, no. 3 (2008): 228–246.
- Truna, Dody S. "The Illustrations of Indigenization of Islam in Indonesian Cultural Landscape." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 5, no. 3 (2021): 337–346.
- van Dijck, José, Thomas Poell, and Martijn de Waal. *The Platform Society: Public Values in a Connective World*.

New York: Oxford University Press, 2018.

Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.

This page is intentionally left blank.